



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1683/DJU/TI.1/VIII/2024 Jakarta, 1 Agustus 2024
Lampiran : 6 (enam) lembar
Hal : Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi
dan yang belum mencapai standar nilai EIS
Periode Agustus Tahun 2024

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan Implementasi SIPP di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada bulan Agustus tahun 2024 berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 478/DJU/TI.1.1/III/2024 Hal Revisi penilaian pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri, dengan ini diumumkan Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus, Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP tertinggi pada 5 (lima) Pengadilan Negeri Klas IA, Pengadilan Negeri Klas IB dan II dengan penilaian tertinggi berdasarkan jumlah beban perkara. Selain itu juga disampaikan daftar pengadilan yang belum mencapai standar minimal nilai Evaluasi Implementasi SIPP untuk menerapkan register elektronik. Kategori penilaian sebagai berikut :

I. PENGADILAN TINGGI :

1. Kinerja

- Rasio penanganan perkara banding
- Jangka waktu penyelesaian perkara banding
- Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju
- Rasio pendaftaran perkara banding secara elektronik

2. Kepatuhan

- Pelaksanaan verifikasi berkas perkara
- Pendaftaran perkara banding
- Penetapan Majelis Hakim
- Penunjukan Panitera Pengganti
- Input penetapan Majelis Hakim / Hakim
- Input penunjukan Panitera Pengganti
- Verifikasi salinan putusan pada perkara banding elektronik (eCourt)
- Input penetapan hari sidang
- Input pertimbangan hukum
- Input putusan
- Penetapan hari sidang

- Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara

3. Kelengkapan

- Dokumen elektronik putusan
- Prosentase Upload ke Direktori Putusan

II. PENGADILAN NEGERI :

1. Kinerja

- Penyelesaian perkara tepat waktu
- Rilis versi SIPP
- Kesesuaian kode satker nomor perkara
- Jangka waktu pelaksanaan delegasi masuk

2. Kepatuhan

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Pendaftaran perkara | - Penginputan putusan akhir |
| - Pencatatan barang bukti | - Penginputan minutasi |
| - Penetapan Hakim | - Pelaksanaan minutasi |
| - Penetapan Panitera Pengganti | - Penginputan permohonan banding |
| - Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti | - Penginputan permohonan kasasi |
| - Penetapan hari sidang pertama | - Penginputan permohonan PK |
| - Penginputan tuntutan | - Pengiriman berkas banding |
| - Pengiriman berkas kasasi | - Pengiriman berkas PK |
| - Pemberitahuan putusan / penetapan | - Unggah Putusan Akhir |
| - Penginputan penetapan Majelis/Hakim | - Penginputan penetapan PP |
| - Penginputan penetapan hari sidang | |
| - Penginputan penetapan Jurusita/JSP | |
| - Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi | |
| - Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang | |
| - Kepatuhan Penundaan Perpanjangan Penahanan | |
| - Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Perdata | |
| - Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Pidana | |

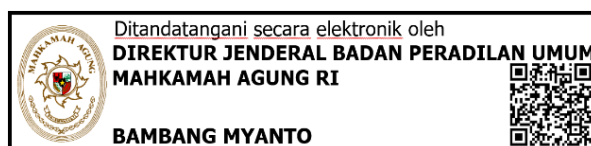
3. Kelengkapan

- | | |
|---|-----------------------|
| - E-Document dakwaan/petitum | - Data lapor mediasi |
| - Pencatatan saksi | - Data diversi |
| - E-Document tuntutan | - Data nilai sengketa |
| - E-Document putusan akhir/penetapan | |
| - Dokumen elektronik berita acara sidang | |
| - Dokumen elektronik relaas panggilan sidang pertama | |
| - Dokumen elektronik rencana persidangan (<i>Court Callendar</i>) | |
| - Dokumen elektronik putusan anonimisasi | |

4. Kesesuaian

- Agenda sidang terakhir
- Tanggal putusan dan tanggal sidang terakhir
- Publikasi pihak
- Pengisian BHT
- Penahanan
- Sisa biaya perkara tingkat pertama
- Pelaksanaan sinkronisasi SIPP WEB
- Verifikasi dokumen elektronik elitigasi
- Pelaksanaan sinkronisasi SIPP ke Data Center MARI
- Pengarsipan Perkara

Apresiasi / penghargaan kami sampaikan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah melakukan banyak perbaikan dalam mengimplementasikan SIPP, namun bagi Pengadilan-pengadilan Negeri yang belum mencapai penilaian implementasi SIPP sesuai standar karena hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan agar dapat mendorong perbaikan kinerjanya.



Tembusan:

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM Ketua Kamar Pengawasan;
3. Yth Ketua Kamar Pembinaan;

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN TINGGI
PERIODE JULI TAHUN 2024

I. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan Perkara **dias 1000**

NO	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	> 1001	Pengadilan Tinggi Semarang	346.20	550.00	100.00	996.20
2	> 1001	Pengadilan Tinggi Makassar	337.97	549.58	98.96	986.51
3	> 1001	Pengadilan Tinggi Surabaya	335.55	549.38	99.77	984.70

II. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan Perkara **301 s/d 1000**

NO	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	301~1000	Pengadilan Tinggi Palembang	341.91	550.00	100.00	991.91
2	301~1000	Pengadilan Tinggi Denpasar	342.22	550.00	97.78	990.00
3	301~1000	Pengadilan Tinggi Jambi	339.56	550.00	100.00	989.56

III. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi dengan Perkara **1 s/d 300**

NO	JUMLAH PERKARA	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	TOTAL
1	1~300	Pengadilan Tinggi Gorontalo	346.85	550.00	97.06	993.91
2	1~300	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	343.22	550.00	98.28	991.50
3	1~300	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	341.25	550.00	100.00	991.25

Data ditarik tanggal 1 Agustus 2024 Jam 09.00 WIB

EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PERIODE JULI TAHUN 2024

I. Nilai Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

NO	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL (%)
1	Pengadilan Negeri Palembang	95%	96%	98%	98%	96.70%
2	Pengadilan Negeri Sidoarjo	93%	98%	93%	100%	95.89%
3	Pengadilan Negeri Surabaya	93%	96%	97%	96%	95.60%
4	Pengadilan Negeri Surakarta	95%	98%	96%	90%	94.98%
5	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	91%	97%	94%	98%	94.84%
6	Pengadilan Negeri Tangerang	93%	95%	95%	96%	94.58%
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	88%	95%	95%	97%	93.74%
8	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	91%	92%	95%	95%	93.26%
9	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	86%	95%	92%	94%	91.90%
10	Pengadilan Negeri Bekasi	91%	93%	86%	95%	91.20%
11	Pengadilan Negeri Semarang	92%	93%	85%	93%	90.71%
12	Pengadilan Negeri Bandung	94%	92%	85%	89%	89.98%
13	Pengadilan Negeri Medan	91%	91%	82%	92%	88.99%
14	Pengadilan Negeri Makassar	92%	88%	85%	89%	88.48%
15	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	91%	87%	73%	86%	84.29%

II. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	>2000	Pengadilan Negeri Pekanbaru	95%	97%	98%	100%	97.44%
2	>2000	Pengadilan Negeri Malang	96%	97%	95%	97%	96.03%
3	>2000	Pengadilan Negeri Jember	96%	97%	93%	96%	95.64%

II. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas 2000 dengan Nilai Implementasi Dibawah 90%

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	>2000	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	94%	91%	86%	82%	88.18%

III. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas 1001 s/d 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Serang	95%	97%	99%	100%	97.92%
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Yogyakarta	96%	98%	98%	96%	97.02%
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	95%	98%	95%	100%	96.87%

III. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas **1001 s/d 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Dibawah 90%**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Ambon	93%	89%	84%	91%	88.98%
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Jayapura	92%	92%	79%	92%	88.83%
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Padang	91%	81%	73%	83%	81.84%

IV. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas **1 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~1000	Pengadilan Negeri Klaten	96%	99%	100%	99%	98.52%
2	1~1000	Pengadilan Negeri Sragen	96%	98%	99%	98%	97.86%
3	1~1000	Pengadilan Negeri Pati	96%	98%	98%	99%	97.73%

IV. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara diatas **1 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Dibawah 90%**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~1000	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	96%	91%	75%	93%	88.85%

V. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **1001 s/d 2000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1001~2000	Pengadilan Negeri Bojonegoro	96%	98%	99%	98%	97.76%
2	1001~2000	Pengadilan Negeri Karawang	95%	97%	96%	99%	96.93%
3	1001~2000	Pengadilan Negeri Tuban	96%	98%	94%	99%	96.86%
4	1001~2000	Pengadilan Negeri Baturaja	97%	99%	91%	100%	96.72%
5	1001~2000	Pengadilan Negeri Jombang	95%	97%	96%	99%	96.64%

VI. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501~1000	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	98%	99%	100%	99%	99.00%
2	501~1000	Pengadilan Negeri Metro	97%	99%	99%	100%	98.68%
3	501~1000	Pengadilan Negeri Madiun	98%	99%	99%	99%	98.55%
4	501~1000	Pengadilan Negeri Sukabumi	96%	99%	99%	100%	98.51%
5	501~1000	Pengadilan Negeri Sungai Liat	99%	98%	96%	100%	98.35%

VI. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Dibawah 90%**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501~1000	Pengadilan Negeri Ponorogo	96%	92%	72%	99%	89.82%
2	501~1000	Pengadilan Negeri Garut	95%	90%	81%	92%	89.39%
3	501~1000	Pengadilan Negeri Pelalawan	96%	96%	79%	86%	89.32%
4	501~1000	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	93%	93%	73%	91%	87.58%
5	501~1000	Pengadilan Negeri Raba/bima	92%	89%	78%	87%	86.34%
6	501~1000	Pengadilan Negeri Kabanjahe	95%	88%	77%	80%	84.97%
7	501~1000	Pengadilan Negeri Makale	95%	86%	69%	89%	84.58%
8	501~1000	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	90%	90%	73%	83%	84.01%

VII. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~500	Pengadilan Negeri Martapura	96%	99%	99%	99%	98.47%
2	1~500	Pengadilan Negeri Kandangan	96%	99%	99%	97%	97.72%
3	1~500	Pengadilan Negeri Kolaka	94%	99%	98%	99%	97.43%
4	1~500	Pengadilan Negeri Magelang	94%	99%	99%	97%	96.98%
5	1~500	Pengadilan Negeri Temanggung	98%	99%	95%	95%	96.78%

VIII. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara diatas **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Dibawah 90%**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~500	Pengadilan Negeri Limboto	89%	97%	82%	91%	89.72%
2	1~500	Pengadilan Negeri Pamekasan	95%	90%	76%	90%	87.78%
3	1~500	Pengadilan Negeri Bukittinggi	79%	90%	84%	93%	86.60%

IX. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara diatas **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Magetan	98%	98%	99%	100%	98.70%
2	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Trenggalek	96%	98%	97%	100%	98.03%
3	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Menggala	94%	99%	98%	99%	97.44%
4	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Batang	97%	98%	96%	97%	97.12%
5	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Lahat	97%	99%	96%	96%	97.07%

X. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara diatas **501 s/d 1000** dengan Nilai Implementasi **SIPP Dibawah 850**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501 ~ >1000	Pengadilan Negeri Pangkajene	96%	85%	78%	82%	85.28%

IX. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara diatas **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Tertinggi**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~500	Pengadilan Negeri Rantau	100%	100%	100%	100%	99.96%
2	1~500	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	100%	99%	96%	100%	98.90%
3	1~500	Pengadilan Negeri Waikabubak	96%	99%	100%	99%	98.30%
4	1~500	Pengadilan Negeri Andoolo	96%	100%	98%	99%	98.22%
5	1~500	Pengadilan Negeri Wonosari	98%	99%	98%	98%	98.15%

IX. Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara diatas **1 s/d 500** dengan Nilai Implementasi **SIPP Dibawah 90%**

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	1~500	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	96%	92%	70%	100%	89.60%
2	1~500	Pengadilan Negeri Kepahiang	96%	95%	88%	78%	89.49%
3	1~500	Pengadilan Negeri Takalar	96%	92%	77%	92%	89.47%
4	1~500	Pengadilan Negeri Meulaboh	96%	92%	72%	97%	89.44%
5	1~500	Pengadilan Negeri Painan	81%	95%	92%	86%	88.56%
6	1~500	Pengadilan Negeri Parigi	92%	93%	81%	88%	88.40%
7	1~500	Pengadilan Negeri Balige	85%	92%	77%	94%	87.20%
8	1~500	Pengadilan Negeri Saumlaki	96%	87%	79%	84%	86.71%
9	1~500	Pengadilan Negeri Dobo	96%	89%	67%	94%	86.58%
10	1~500	Pengadilan Negeri Calang	96%	93%	57%	100%	86.57%
11	1~500	Pengadilan Negeri Takengon	96%	94%	68%	86%	85.99%
12	1~500	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	96%	91%	72%	84%	85.76%

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
13	1~500	Pengadilan Negeri Blangkejeren	96%	90%	69%	81%	83.82%
14	1~500	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	87%	95%	72%	75%	82.15%
15	1~500	Pengadilan Negeri Sabang	96%	83%	67%	81%	81.62%
16	1~500	Pengadilan Negeri Sinabang	96%	85%	67%	62%	77.41%

Data ditarik Tanggal 1 Agustus 2024 Jam 09.15